

BAB IV

HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian

4.1.1 Kebijakan Umum

Menurut peraturan daerah nomor 11 tahun 2012 tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten jepara tahun 2012 – 2017 untuk mewujudkan tujuan dan sasaran setiap misi serta berdasarkan arah kebijakan yang ditetapkan, disusun program-program pembangunan. Program-program yang tercantum dalam RPJMD merupakan program pendukung langsung dalam pencapaian kinerja makro sedangkan program yang tidak mendukung langsung akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Tahunan Daerah sesuai kebutuhan dan ketersediaan anggaran.

A. Misi Pertama :

Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang adil, bersih, bertanggung jawab, dan bermartabat dengan mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam dan APBD sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat.

1. Urusan Lingkungan Hidup

Kebijakan pada Urusan Lingkungan Hidup diarahkan pada mewujudkan kualitas lingkungan dalam rangka meningkatkan daya dukung lingkungan dan antisipasi terhadap perubahan iklim melalui (1) Penegakan hukum lingkungan yang adil dan tegas; (2) Peningkatan peran pemangku kepentingan dalam pengelolaan

lingkungan hidup; (3) Peningkatan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup (4) Adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.

2. Urusan Penataan Ruang

Kebijakan pada Urusan Penataan Ruang diarahkan untuk mewujudkan tata ruang kota yang sinergis, serasi dan berkelanjutan didukung oleh dokumen perencanaan tata ruang yang realistis dan implementatif, penegakan hukum (*lawenforcement*) yang tegas, dan tersedianya aparat pelaksana yang bertanggung jawab

3. Urusan Perencanaan Pembangunan

Kebijakan pada Urusan Perencanaan Pembangunan diarahkan untuk pencapaian keserasian dan sinergitas perencanaan pembangunan daerah pada masing-masing urusan

4. Urusan Kependudukan Dan Catatan Sipil

Kebijakan pada urusan Kependudukan dan Catatan Sipil diarahkan pada upaya pengelolaan administrasi kependudukan berbasis *Single Identification Number* dan pencatatan sipil dalam kerangka keseimbangan persebaran penduduk

5. Urusan Pertanahan

Kebijakan pada Urusan Pertanahan diarahkan untuk pencapaian tertib administrasi pertanahan yang meliputi penetapan penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah guna meningkatkan sarana prasarana pelayanan masyarakat

6. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian

Kebijakan pada urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian dalam negeri diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan publik melalui 1) Pengembangan kapasitas aparat pemerintahan daerah, 2) Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintahan daerah; 3) Peningkatan sarana prasarana pelayanan masyarakat; 5) Peningkatan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel; 6) Peningkatan kualitas dan kuantitas produk-produk hukum daerah; 7) Peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah; 8) Peningkatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah

7. Urusan Statistik

Kebijakan pada Urusan Statistik diarahkan untuk pengembangan data/informasi/statistik daerah

8. Urusan Kearsipan

Kebijakan pada Urusan Kearsipan diarahkan untuk memperbaiki sistem administrasi kearsipan.

9. Urusan Energy Dan Sumber Daya Mineral

Kebijakan pada Urusan energi dan sumberdaya mineral diarahkan pada pengelolaan Energi dan Sumberdaya Mineral

dengan memperhatikan prinsip keberlanjutannya bagi generasi yang akan datang melalui pengendalian dan pemanfaatan lahan bekas galian C, penataan lahan kritis dan penggunaan air bawah tanah (ABT), serta pengembangan terkait tenaga listrik di karimunjawa dengan energi baru terbarukan

B. Misi Kedua :

Pemberdayaan ekonomi rakyat melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor produktif (UMKM, Koperasi, Pertanian, Nelayan, dan Perburuhan) bagi upaya perluasan kesempatan berusaha dan kesempatan kerja guna memberantas pengangguran dan kemiskinan.

1. Urusan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah

Kebijakan pada Urusan Koperasi dan UKM diarahkan untuk mewujudkan sistem ekonomi kerakyatan melalui (1) pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM), (2) fasilitasi akses permodalan KUMKM, dan (3) pengembangan manajemen pengelolaan KUMKM

2. Urusan Ketenagakerjaan

Kebijakan pada Urusan Ketenagakerjaan diarahkan untuk meningkatkan kualitas dan produktifitas tenaga kerja.

3. Urusan Ketahanan Pangan

Kebijakan pada Urusan ketahanan pangan diarahkan pada tersedianya kebutuhan bahan pangan bagi masyarakat melalui (1)

penganekaragaman bahan pangan; 2) peningkatan ketersediaan dan kualitas bahan pangan; 3) peningkatan kelancaran distribusi bahan pangan

4. Urusan Kelautan Dan Perikanan

Kebijakan pada Urusan kelautan dan perikanan diarahkan pada terwujudnya pemanfaatan sumberdaya perikanan laut dan darat yang secara optimal dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan melalui (1) peningkatan kualitas SDM Nelayan; (2) pengelolaan potensi kelautan secara optimal dan pengembangan perikanan

5. Urusan Pertanian

Kebijakan pada Urusan Pertanian diarahkan pada terwujudnya pemanfaatan sumberdaya pertanian secara optimal dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan melalui (1) peningkatan kualitas SDM Pertanian; (2) pengelolaan potensi lahan secara optimal; (3) pengembangan sumber daya pertanian

6. Urusan Kehutanan

Kebijakan pada Urusan kehutanan diarahkan pada terwujudnya sumberdaya alam/hutan yang dapat berfungsi sebagai meda pengatur tata air dan kelestarian lingkungan melalui (1) pengelolaan pemanfaatan potensi sumberdaya alam/ hutan; (2) rehabilitasi sumberdaya alam/ hutan

7. Urusan Transmigrasi

Kebijakan pada Urusan Transmigrasi diarahkan untuk pengembangan wilayah transmigrasi.

C. Misi Ketiga :

Peningkatan percepatan capaian pembangunan untuk semua, serta perbaikan kualitas lingkungan, mencakup pembangunan pembangunan manusia seutuhnya, lewat peningkatan mutu pendidikan, layanan publik, kesehatan, pemberdayaan ibu dan anak, pemuda, olahraga, sanitasi lingkungan dan penataan kehidupan sosial masyarakat.

1. Urusan Pendidikan

Kebijakan pada urusan Pendidikan diarahkan pada (1) peningkatan, pemerataan dan perluasan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu dan terjangkau di semua jenis, jalur dan jenjang pendidikan (2) Pengembangan sekolah kejuruan dalam rangka menjawab kebutuhan pasar kerja; (3) Penuntasan buta huruf dan wajib belajar melalui program Paket A, B dan C; (4) peningkatan kemampuan akademis dan profesionalisme serta peningkatan jaminan kesejahteraan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, melalui Pendidikan dan Pelatihan, pengembangan muatan lokal yang lebih berorientasi pada kondisi dan potensi daerah; (5) Pembangunan dan rehabilitasi gedung gedung sekolah yang sudah tidak layak pakai; penyempurnaan perpustakaan di masing-masing sekolah dan sarana/prasarana pendidikan sebagai

tuntutan KBK seperti Laboratorium, Buku-buku, Ruang UKS, OSIS, Ruang BP, Kantin, WC, Mushalla Sarana olah raga, pagar keliling, dll; (6) Pemenuhan sekolah standar nasional dan internasional, dengan tetap memperhatikan pendidikan bagi golongan yang kurang mampu); serta (7) Peningkatan manajemen sekolah melalui optimalisasi penerapan Manajemen Berbasis Sekolah, pemberdayaan komite sekolah, dewan pendidikan dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan pendidikan.

2. Urusan Kesehatan

Kebijakan pada urusan kesehatan diarahkan pada meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui (1) peningkatan pelayanan kesehatan; (2) peningkatan kualitas Tenaga kesehatan; (3) peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat miskin; (4) peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana kesehatan; (5) peningkatan perilaku dan kemandirian masyarakat pada upaya promotif dan preventif; dan (6) peningkatan manajemen pelayanan kesehatan yang bermuara pada pelayanan kesehatan menyeluruh (*total/universal coverage*).

3. Urusan Pekerjaan Umum

Kebijakan pada Urusan pekerjaan umum diarahkan pada perwujudan keseimbangan pertumbuhan dan pelayanan wilayah melalui (1) pembentukan struktur jaringan jalan sesuai

dengan hirarki dan pelayanan jalan, interkoneksi antar bagian wilayah pengembangan dan antar pusat pelayanan transportasi dan pusat pelayanan perkotaan serta peningkatan kapasitas jalan; (2) pengendalian dan penanggulangan banjir dan rob terpadu dan sistemik; (5) penyempurnaan wajah kota (6) pemenuhan kebutuhan air bersih masyarakat serta menjaga kualitas dan kuantitas sumber daya air

4. Urusan Perumahan

Kebijakan pada Urusan perumahan diarahkan pada upaya-upaya perbaikan permukiman kumuh, peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap konsep rumah sehat, meningkatkan keswadayaan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan perumahan yang sehat, dan mendorong investasi swasta dalam pengadaan rumah sehat sederhana. Serta upaya-upaya pengembangan perlindungan dan pemenuhan hak dasar warga miskin dalam hal ketersediaan perumahan dan perbaikan dalam fasilitas lingkungan perumahan sederhana untuk warga miskin

5. Urusan Pemuda Dan Olah Raga

Kebijakan pada urusan pemuda dan olahraga diarahkan untuk mewujudkan peranan pemuda dalam pembangunan dan pola hidup masyarakat yang sehat jasmani dan rohani melalui (1) penguatan organisasi kepemudaan, 2) peningkatan budaya

dan prestasi olah raga, dan (3) peningkatan sarana prasarana olah raga berskala nasional dan internasional

6. Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Kebijakan pada Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diarahkan untuk pencapaian standar kualitas hidup perempuan dan anak dalam masyarakat

7. Urusan Keluarga Berencana Dan Keluarga Sejahtera

Kebijakan pada urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera diarahkan untuk mewujudkan keluarga sejahtera (*pengendalian kelahiran*) melalui (1) kesadaran masyarakat dalam ber-KB, (2) meningkatkan kualitas kesehatan reproduksi remaja serta pendewasaan usia perkawinan, (3) meningkatkan pemberdayaan dan ketahanan keluarga, (4) memperkuat kelembagaan dan Jejaring KB dalam upaya pembudayaan keluarga kecil berkualitas

8. Urusan Perhubungan

Kebijakan pada Urusan Perhubungan diarahkan untuk peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perhubungan

9. Urusan Sosial

Kebijakan pada Urusan Sosial diarahkan untuk melindungi, melayani dan memberdayakan para penyandang masalah kesejahteraan sosial

10. Urusan Perpustakaan

Kebijakan pada Urusan Perpustakaan diarahkan untuk peningkatan kecerdasan masyarakat dengan mengembangkan minat budaya baca dan pembinaan perpustakaan

D. Misi Keempat :

Mewujudkan masyarakat madani kabupaten Jepara dalam sistem tatanan sosial budaya yang luhur serta berkarakter agar bermartabat Mewujudkan masyarakat madani kabupaten Jepara dalam sistem tatanan sosial budaya yang luhur serta berkarakter agar bermartabat

1. Urusan Komunikasi Dan Informatika

Kebijakan pada Urusan Komunikasi dan Informatika diarahkan untuk pengembangan komunikasi dan informatika serta menjalin hubungan yang harmonis dan saling menghormati dengan media massa.

2. Urusan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri

Kebijakan pada Urusan Kesatuan Bangsa, Politik dan Politik Dalam Negeri diarahkan dalam rangka meningkatkan kondisi aman dan nyaman bagi masyarakat dan lingkungan

3. Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

Kebijakan pada Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa diarahkan pada peran serta dan keberdayaan masyarakat dalam pembangunan wilayah melalui (1) Penguatan kelembagaan

masyarakat; (2) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan wilayah; (3) peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan sarana prasarana prasana wilayah, proses kelurahan dan institusi kemasyarakatan lainnya agar mampu mengidentifikasi permasalahan dan potensi masyarakat yang ada dan mampu mempengaruhi proses pengambilan keputusan, baik dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kebijakan publik, serta mampu menjawab permasalahan yang berkembang dalam lingkungannya

4. Urusan Kebudayaan

Kebijakan pada urusan kebudayaan diarahkan pada pembentukan karakteristik masyarakat yang berbudi luhur melalui (1) pengembangan dan pelestarian potensi budaya lokal yang adi luhung, (2) mencegah masuknya budaya lain yang negatif atau yang tidak sesuai dengan budaya lokal, dan (3) memberi ruang gerak untuk berkreasi dan berinovasi dalam pengembangan kesenian lokal.

E. Urusan Kelima:

Terciptanya nilai budaya unggul (kreatif, produktif, dan inovatif) di dalam pergaulan tata pemerintahan daerah dan lingkungan masyarakat Jepara

1. Urusan Penanaman Modal

Kebijakan pada Urusan penanaman modal diarahkan pada peningkatan investasi dalam rangka peningkatan ekonomi daerah melalui penciptaan iklim yang kondusif, peningkatan investasi/ penanaman modal, pemberdayaan BUMD dan optimalisasi manajemen aset daerah

2. Urusan Kepariwisata

Kebijakan pada Urusan kepariwisataan diarahkan pada terwujudnya Jepara sebagai Kota Wisata melalui pengembangan dan pemanfaatan potensi wisata secara maksimal baik wisata dagang maupun wisata religius, peningkatan manajemen pengelolaan pariwisata serta peningkatan kualitas sumber daya manusia dibidang kepariwisataan

3. Urusan Perindustrian

Kebijakan pada Urusan perindustrian diarahkan pada terwujudnya industri kecil/*home industry* yang bertumpu pada mekanisme pasar melalui (1) inovasi city branding (2) pembinaan industri kecil/*homeindustry*, (3) fasilitasi akses permodalan industri kecil/*home industry*; (4) pengembangan sentra-sentra industri kecil/*home industri*; (5) peningkatan kemitraan usaha industri kecil/*home industry*

4. Urusan Perdagangan

Kebijakan pada Urusan perdagangan diarahkan pada terwujudnya ketesediaan kebutuhan bahan pokok masyarakat dan

peningkatan ekspor melalui (1) pengembangan sarana dan prasarana distribusi barang dan produk; (2) pengembangan potensi produk unggulan daerah; (3) kerjasama peningkatan ekspor daerah.

4.1 Diskripsi Responden

Sample yang disebar dalam penelitian ini sebanyak 86 responden. Namun yang kembali sebanyak 74 kuesioner, 12 kuesioner tidak kembali dikarenakan hilang. Berikut keterangan jumlah kuesioner yang disebar, dikembalikan dan digunakan dapat dilihat pada tabel 4.1 :

Tabel 4 1
Daftar Pengiriman dan Pengembalian Kuesioner

No	Keterangan	Jumlah
1	Kuesioner yang disebar	86
2	Kuesioner yang kembali	74
3	Kuesioner yang digunakan	74
Total kuesioner yang diolah		74

Sumber: Data Primer Diolah 2017

Responden yang terdapat pada OPD yang terdiri atas dinas, badan, sekretariat dan kecamatan pemerintah Kota Jepara memiliki berbagai keragaman identitas dalam pengisian kuesioner. Data dalam penelitian ini sejumlah 74 responden dengan berbagai tingkatan sesuai dengan jenis kelamin, umur, pendidikan terakhir, lama menduduki jabatan, dan latar belakang pendidikan responden. Pengukuran yang digunakan dalam proses penghitungan responden dapat disajikan pada tabel-tabel berikut ini.

1.2.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Dalam pengukuran jenis kelamin di ambil 5 tingkatan pendidikan yang paling tinggi di Indonesia yaitu SMA,Diploma (D3), Sarjana (S1), Magister (S2), dan Doktor (S3). Berikut keterangan jenis kelamin yang dipilih dapat dilihat pada tabel 4.2 :

Tabel 4 2
karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin

No	Jenis kelamin	Jumlah	Persentase
1	Pria	29	39,1%
2	Wanita	45	60,8%
Jumlah		74	100%

Sumber: Data Primer Diolah 2017

Berdasarkan data pada tabel 4.2 kriteria umur yang terdapat pada OPD terdiri atas dinas, badan, sekretariat, dan kecamatan pemerintah Kabupaten Jepara didominasi oleh pria sebanyak 45 orang responden atau 60,8 % dibandingkan dengan wanita sebanyak 35 orang responden dengan perbandingan persentase sebesar 39,1 %.

1.2.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Umur

Umur berkaitan dengan perilaku seseorang yang di lokasi kerja biasanya adalah gambaran pengalaman dan tanggungjawab dalam bekerja. Berikut ini tabel 4.3 karakteristik berdasarkan umur:

Tabel 4 3
Karakteristik Berdasarkan Umur

No	Umur	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	20-29	17	23,0%
2	30-39	28	37,,8%
3	40-49	18	24,3%
4	50-59	11	14,8%
Jumlah		74	100%

Sumber: Data Primer Diolah 2017

Tabel 4.3 menunjukkan bahwa terdapat perbandingan umur para responden yang cukup didominasi oleh umur 30-39 dan sebanyak 38 orang dan 49-49 tahun sebanyak 18 orang masing-masing dengan persentase sebesar 37,8% dan 24,3 %. Perbandingan selanjutnya yang terjadi dalam umur 20-29 tahun sebanyak 17 orang dengan prosentase 23% dan umur 50-59 tahun sebanyak 11 orang dengan prosentase 14,8 %. Hal ini memberikan arti bahwa umur yang produktif dan yang lebih banyak dimiliki oleh responden OPD mempunyai potensi untuk berkembang dan berkinerja dengan baik.

1.2.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Dalam pengukuran tingkat pendidikan di ambil 5 tingkatan pendidikan yang paling tinggi di Indonesia yaitu SMA,Diploma (D3), Sarjana (S1), Magister (S2), dan Doktor (S3). Berikut keterangan tingkat pendidikan yang dipilih dapat dilihat pada tabel 4.4 :

Tabel 4 4
Karakteristik Respponden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

No	Pendidikan Terakhir	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	SMA	5	6,7%
2	D3	10	13,5%
3	S1	44	59,5%
4	S2	15	20,3%
5	S3	0	0%
Jumlah		74	100%

Sumber: Data Primer Diolah 2017

Tingkat pendidikan responden pada OPD Kota Jepara didominasi tingkat strata 1 (S1) sebanyak 44 orang dengan prosentase sebesar 59,5% dan Strata II (S2) sebanyak 15 orang dengan persentase sebesar 20,3%. Perbandingan selanjutnya yang terjadi pada pendidikan D3 sebanyak 10 orang dengan persentase 13,5% dan SMA sebanyak 5 orang dengan persentase sebanyak 6,7%. Hal ini menunjukkan bahwa responden telah memiliki pendidikan yang cukup memadai dalam melaksanakan tugas. Disamping itu responden memiliki lebih banyak ilmu dalam mengelola wewenang yang diemban sehingga memiliki kinerja yang baik.

1.2.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Menduduki Jabatan

Berikut tabel 4.5 status lama menduduki jabatan di Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara.

Tabel 4 5
Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Menduduki Jabatan

No	Lama Bekerja	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	1-5 Th	20	27,0%
2	5-10 Th	32	44,6%
3	>10 Th	22	29,7%
Jumlah		74	100%

Sumber: Data Primer Diolah 2017

Pada tabel 4.5 menunjukkan lama responden dalam menduduki jabatannya yang didominasi sekitar 5-10 tahun sebanyak 33 orang dan lebih dari 10 tahun sebanyak 22 orang dengan persentase masing – masing sebesar 44,6% dan 29.7% serta 1-5 tahun sebanyak 20 orang dengan persentase sebesar 27,0%. Hal ini memberikan arti bahwa lama jabatan yang diduduki oleh responden mempunyai potensi untuk responden berkembang dan berkinerja dengan baik.

1.2.5 Karakteristik Responden Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan

Dalam pengukuran latar belakang pendidikan di ambil 6 tingkatan latar belakang pendidikan yang paling diminati di Indonesia yaitu Akuntansi, Manajemen, Hukum, Pertanian, Syariah, dan Kesehatan. Berikut keterangan latar belakang pendidikan yang dipilih dapat dilihat pada tabel 4.6:

Tabel 4 6
Karakteristik Responden Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan

No	Latar Belakang Pendidikan	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	Akuntansi	35	47,3%
2	Manajemen	20	27,0%
3	Hukum	0	0%
4	Pertanian	0	0%
5	Syariah	0	0%
6	Kesehatan	1	1,4%
7	Lainnya	18	24,3%
Jumlah		74	100%

Sumber: Data Primer Diolah 2017

Latar belakang pendidikan responden pada OPD Kota Jepara didominasi oleh program studi Akuntansi sebanyak 35 orang dan manajemen sebanyak 20 orang dengan persentase masing –masing sebesar 47,3% dan 27,0%. Serta program studi kesehatan sebanyak 1 orang dengan persentase sebesar 1,4% dan lainnya sebanyak 18 orang sebesar 24,3%. Hal ini memberikan arti bahwa latar belakang pendidikan yang dimiliki oleh responden OPD mempunyai potensi untuk berkembang dan berkinerja dengan baik.

4.2 Diskripsi Variabel

Deskripsi variabel penelitian berikut ini menunjukkan tanggapan responden dari variabel dependen dan independen mengenai pengaruh kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja OPD Kabupaten Jepara.

4.3.1 Variabel Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia pengguna sistem dituntut untuk memiliki tingkat keahlian akuntansi yang memadai atau paling tidak memiliki kemauan untuk terus belajar dan mengasah kemampuan dibidang akuntansi. Kemampuan sumber daya manusia itu sendiri sangat berperan dalam meng-hasilkan informasi yang berkualitas. Dikarenakan sumber daya manusia adalah kunci utama dalam sebuah organisasi dan juga pemegang kendali dalam keberhasilan sebuah organisasi. Dalam hal ini sumber daya manusia sangat diutamakan kemampuannya agar menghasilkan laporan keuangan yang baik.

Dalam penelitian ini terdapat 8 indikator yang harus dijawab oleh responden dalam kuesioner. Setiap indikator terdapat 5 pilihan jawaban yaitu sangat tidak setuju (STS), tidak setuju (TS), ragu-ragu (RR), setuju (S), dan sangat setuju (SS) diberi nilai sesuai dengan skala likert 1-5. Delapan indikator dalam variabel sumber daya manusia (Rahayuningsih 2015) :

1. Bagian akuntansi/keuangan minimal lulusan SMA/D3 akuntansi
2. Bagian akuntansi/keuangan memiliki uraian peran dan fungsi yang jelas
3. Peran dan tanggungjawab seluruh bagian akuntansi/keuangan ditetapkan secara jelas dalam peraturan daerah
4. Uraian tugas bagian akuntansi/keuangan sesuai dengan fungsi akuntansi

5. Pelatihan untuk membantu penugasan dan pengembangan keahlian dalam tugas yang dilakukan
6. Fasilitas pelatihan yang diberikan sudah cukup memadai
7. Jenis pelatihan yang diberikan sudah sesuai dengan yang dibutuhkan dengan pekerjaan
8. Pegawai yang dikirim dalam mengikuti pelatihan adalah mereka sesuai dengan bidang pekerjaan.

Dari pengolahan kuesioner diatas didapatkan bahwa 74 responden memberikan jawaban yang bervariasi dan berbeda beda, namun dapat disimpulkan bahwa responden paling banyak memilih sangat setuju karena dari 8 indikator jawaban setuju memiliki prosentase paling tinggi yaitu sebesar 67,5% dan berada pada indikator SDM.8.

4.3.2 Variabel Pengendalian Intern

Sistem pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, kendalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang – undangan. Sedangkan sistem pengendalian intern (SPIP) adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Dalam penelitian ini terdapat 14 indikator yang harus dijawab oleh responden dalam kuesioner. Setiap indikator terdapat 5 pilihan jawaban yaitu sangat tidak setuju (STS), tidak setuju (TS), ragu-ragu (RR), setuju (S), dan sangat setuju (SS) dan diberi nilai sesuai dengan skala likert 1-5. Empat belas indikator dalam variabel pengendalian intern (Rahayuningsih 2015) :

1. Struktur organisasi telah memuat secara jelas garis wewenang dan tanggungjawab setiap fungsi
2. Adanya fungsi pemeriksaan intern
3. OPD mempunyai kode etik pegawai instansi pemerintah secara tertulis
4. Pimpinan telah memberikan contoh dalam berperilaku patuh terhadap peraturan
5. Sebagai tindak lanjut dari penilaian terhadap kualitas pengendalian intern, OPD telah melakukan perbaikan pengendalian.
6. Terdapat prosedur yang jelas mengenai kepegawaian, pengembangan, penilaian prestasi dan kompensasi kepada pegawai
7. Adanya pendelegasian wewenang dan tanggungjawab atasan kepada staf. Khususnya berhubungan dengan keuangan / akuntansi
8. Setiap transaksi yang terjadi harus didukung dengan bukti transaksi yang valid
9. Transaksi tidak dapat dilakukan tanpa adanya otorisasi dari pihak yang berwenang

10. Sub.bagian keuangan / akuntansi telah mencatat transaksi keuangan pada buku jurnal pada setiap transaksi keuangann terjadi
11. Sub.bagian akuntansi / keuangan mencatat semua penyesuaian pada jurnal penyesuaian
12. Dalam waktu yang tidak ditentukan Pimpinan OPD melakukan pemeriksaan mendadak terhadap catatan akuntansi
13. Dalam pengelolaan keuangan,perlu melakukan indentifikasi dan analisis risiko.
14. Identifikasi dan analisis risiko dalam pengelolaan keuangan daerah bertujuan untuk menghindari/meminimalkan risiko yang dihadapi

Dari pengolahan kuesioner diatas didapatkan bahwa 74 responden memberikan jawaban yang bervariasi dan berbeda – beda , namun dapat disimpulkan bahwa responden paling banyak memilih sangat setuju karena dari 14 indikator jawaban setuju memiliki prosentase paling tinggi yaitu sebesar 87,8% dan berada pada indikator PI.6.

4.3.3 Variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi

Pemanfaatan teknologi informasi merupakan penggunaan secara optimal dari komputer, per-angkat lunak, *database*, jaringan, *electronic com-merce*, dan jenis lainnya yang berhubungan dengan teknologi. Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah, dan menyalurkan Informasi Keuangan Daerah kepada pelayanan publik.

Dalam penelitian ini terdapat 11 indikator yang harus dijawab oleh responden dalam kuesioner. Setiap indikator terdapat 5 pilihan jawaban yaitu sangat tidak setuju (STS), tidak setuju (TS), ragu-ragu (RR), setuju (S), dan sangat setuju (SS) dan diberi nilai sesuai dengan skala likert 1-5. Sebelas indikator dalam variabel pemanfaatan teknologi informasi (Rahayuningsih 2015):

1. Sub. Bagian akuntansi/keuangan telah memiliki *software* aplikasi untuk melaksanakan tugas
2. Proses akuntansi telah dilaksanakan secara komputerisasi
3. Pengolahan data transaksi keuangan menggunakan *software* yang memadai dan sesuai dengan undang - undang
4. Laporan keuangan dihasilkan dari sistem integrasi yang terintegrasi
5. Ada jadwal pemeliharaan peralatan komputer secara teratur
6. peralatan yang rusak di data tepat waktu
7. Sub.bagian akuntansi/keuangan memiliki komputer dengan jumlah yang cukup untuk melaksanakan tugas
8. Setiap unit kerja memiliki jaringan internet
9. Jaringan internet sudah dimanfaatkan di unit kerja untuk menghubungkan dalam pengiriman informasi yang dibutuhkan
10. Terdapat sistem keamanan (anti virus) yang diperbaiki secara teratur
11. Pencatatan transaksi keuangan dalam jurnal selalu menggunakan bukti transaksi yang sudah dilakukan secara komputerisa

Dari pengolahan kuesioner diatas didapatkan bahwa 74 responden memberikan jawaban yang bervariasi dan berbeda beda, namun dapat disimpulkan bahwa responden paling banyak memilih sangat setuju karena dari 11 indikator jawaban sangat setuju memiliki prosentase paling tinggi yaitu sebesar 63,5% dan berada pada indikator PTI.10.

4.3.4 Variabel Pemahaman Akuntansi

Pemahaman akuntansi sebagai struktur membedakan, ukuran (untuk mengevaluasi), dan melaporkan data untuk mengevaluasi penilaian keuangan dan pilihan (keputusan yang dijalankan) dan untuk para pemakai data. Sehingga akuntansi harus dilaksanakan sebagai salah satu usaha persiapan dalam menetapkan suatu pilihan atau tindakan di masa depan. Maka dari itu, pemahaman akuntansi dari OPD kabupaten Jepara sangat diharapkan dalam membantu tercapainya laporan keuangan yang berkualitas.

Dalam penelitian ini terdapat 13 indikator yang harus dijawab oleh responden dalam kuesioner. Setiap indikator terdapat 5 pilihan jawaban yaitu sangat tidak setuju (STS), tidak setuju (TS), ragu-ragu (RR), setuju (S), dan sangat setuju (SS) dan diberi nilai sesuai dengan skala likert 1-5. Tiga belas indikator dalam variabel pemahaman akuntansi (Yuliani 2010):

1. Sub bagian keuangan/akuntansi mengerti benar proses akuntansi
2. Tanggungjawab penyusunan dan penyajian laporan keuangan berada pada pimpinan entitas

3. Laporan keuangan OPD/SKPD terdiri dari realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan CALK
4. Laporan realisasi anggaran menggambarkan perhitungan antara anggaran dengan realisasinya
5. Asset diakui pada saat diterima atau kepemilikannya berubah
6. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul
7. kas dicatat sebesar nilai nominal
8. persediaan dicatat sebesar biaya perolehan apabila perolehan apabila diperoleh dengan pembelian
9. setiap ada kesalahan harus dilakukan koreksi segera setelah diketahui
10. berdasarkan SAP, peristiwa luar biasa baru layak digolongkan peristiwa luar biasa apabila peristiwa tersebut sudah menyerap 50% atau lebih anggaran tahunan
11. jumlah dan pengaruh yang diakibatkan oleh peristiwa luar biasa harus diungkapkan secara terpisah dalam catatan atas laporan keuangan
12. entitas pelaporan menyusun laporan keuangan dengan menggabungkan laporan keuangan seluruh entitas akuntansi yang berada dibawahnya
13. laporan keuangan konsolidasi tidak lagi bisa diperbaiki lagi walaupun ditemukan kesalahan

Dari pengolahan kuesioner diatas didapatkan bahwa 74 responden memberikan jawaban yang bervariasi dan berbeda beda, namun dapat disimpulkan bahwa responden paling banyak memilih sangat setuju karena

dari 13 indikator jawaban sangat setuju memiliki prosentase paling tinggi yaitu sebesar 71,6% dan berada pada indikator PA.7.

4.3.5 Variabel Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran – ukuran normative yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Adapun karakteristik kualitatif laporan keuangan yaitu: relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Maka dari itu, laporan keuangan yang dihasilkan OPD Kabupaten Jepara sangat diharapkan membantu para pengguna dari laporan keuangan.

Dalam penelitian ini terdapat 16 indikator yang harus dijawab oleh responden dalam kuesioner. Setiap indikator terdapat 5 pilihan jawaban yaitu sangat tidak setuju (STS), tidak setuju (TS), ragu-ragu (RR), setuju (S), dan sangat setuju (SS) dan diberi nilai sesuai dengan skala likert 1-5. Tiga belas indikator dalam variabel pelaporan keuangan pemerintah daerah (Rahayuningsih 2015):

1. Laporan keuangan yang dihasilkan dapat memberikan informasi yang memungkinkan bagi pengguna untuk mengoreksi ekspektasi mereka dimasa lalu
2. Laporan keuangan yang dihasilkan dapat digunakan untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan masa lalu
3. Informasi laporan keuangan yang dihasilkan segera tersedia ketika dibutuhkan

4. Laporan - laporan yang ada di dalam laporan keuangan tersedia secara sistematis dan teratur
5. Sub.bagian akuntansi/keuangan menyelesaikan laporan keuangan secara tepat waktu
6. Informasi yang dihasilkan dari laporan keuangan disajikan secara lengkap disertai penjelasan atas setiap butir informasi utuh
7. Informasi yang dihasilkan dari laporan keuangan telah menggambarkan dengan jujur transaksi yang seharusnya disajikan dalam laporan keuangan
8. Laporan keuangan yang dihasilkan dapat diuji dengan laporan keuangan yang lain
9. Rekonsiliasi dilakukan secara periodik antara catatan akuntansi dengan catatan Bank/catatan pihak eksternal yang membutuhkan konfirmasi/rekonsiliasi
10. Informasi laporan keuangan digunakan untuk kepentingan umum bukan untuk kebutuhan pribadi
11. Informasi yang termuat dalam laporan keuangan dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya dan dapat dibandingkan dengan laporan keuangan entitas lain
12. Laporan keuangan yang dihasilkan telah dapat dijadikan tolok ukur dalam penyusunan anggaran tahun berikutnya
13. Informasi yang dihasilkan dari laporan keuangan sudah menggunakan Standar Akuntansi Pemerintah

14. penyusunan laporan keuangan menggunakan kebijakan yang sama dari tahun ke tahun
15. Laporan keuangan yang mengalami perubahan selalu disampaikan dalam CALK
16. Laporan keuangan yang disajikan menggunakan bahasa dan istilah yang disesuaikan dengan bahasa akuntansi.

Dari pengolahan kuesioner diatas didapatkan bahwa 74 responden memberikan jawaban yang bervariasi dan berbeda beda, namun dapat disimpulkan bahwa responden paling banyak memilih setuju karena dari 16 indikator jawabansetuju memiliki prosentase paling tinggi yaitu sebesar 59,5% dan berada pada indikator PKP.16.

4.3 Analisis Data

4.4.1 Uji Instrument Penelitian

Sebelum melakukan pengujian data dan pengujian hipotesis, terlebih dahulu dilakukan pengujian atas kualitas data untuk menjamin bahwa data yang diperoleh sudah dapat digunakan dalam penarikan kesimpulan. Pengujian ini secara umum diarahkan untuk menguji alat ukur yang digunakan (kuesioner) serta data yang diperoleh dari responden. Variabel X_1 , X_2 , X_3 , X_4 dan Y memenuhi persyaratan untuk diuji variabel karena variabel tersebut bersifat konstrak yang artinya tidak dapat diukur secara langsung sehingga nilai ukurnya harus menggunakan instrumen dan item-item. Dalam pengambilan data variabel tersebut

menggunakan beberapa instrumen dimana nilai dari masing-masing instrumen dapat mengukur konstruk variabel secara valid dan reliabel.

1. Uji Validitas

Dalam melakukan uji validitas suatu kuesioner yang pertama adalah menentukan koefisien korelasi (r) baik itu r tabel maupun r hitung yang nantinya antara kedua koefisien korelasi (r) tersebut dibandingkan untuk menyakatan kevalidan instrumen untuk mengukur konstruk kuesioner, instrumen dinyatakan valid jika memiliki koefisien korelasi (r) hitung $>$ dari koefisien korelasi (r) tabel. Penelitian ini menggunakan tingkat signifikansi 0,05 atau 5%.

Uji validitas dilakukan kepada 74 responden dengan menggunakan analisis korelasi *product moment*. Antara korelasi skor faktor dengan skor total positif dan memiliki nilai di atas maka dapat dikatakan memiliki konstruk yang kuat dalam hal validitas instrumen yang dapat digunakan. Hasil uji instrumen dengan uji validitas dapat dilihat pada lampiran .

Hasil pengujian validitas menunjukkan bahwa instrumen yang digunakan dalam penelitian yang terdiri atas sumber daya manusia (X_1), pengendalian intern (X_2), pemanfaatan teknologi informasi (X_3), pemahaman akuntansi (X_4) serta kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah (Y) memiliki korelasi skor faktor dengan skor total (*Pearson Correlation*) positif dan besarnya di

atas 0,190. Hal ini berarti keseluruhan butir pernyataan dalam kuisisioner tersebut dapat dikatakan valid.

2. Uji Reliabilitas

Secara umum uji reliabilitas dilakukan juga suatu kuisisioner dengan data konstruk sudah di uji dengan uji validitas, suatu data yang tidak lolos dalam uji validitas tidak bisa dilakukan uji reliabilitas, bisa dikatakan bahwa uji validitas dan uji reliabilitas ini saling berkesinambungan. Data yang reliabel berarti dapat dipercaya, dengan melakukan uji reliabilitas memungkinkan peneliti untuk mengetahui apakah kuisisioner yang diberikan kepada responden akan tetap sama hasilnya meskipun digunakan berulang-ulang.

Cara yang digunakan dalam uji reliabilitas ini adalah dengan membandingkan hasil dari perhitungan *Cronbach alpha* (α) yang dilakukan dengan aplikasi *Statistical Program for Social Science* versi 20. Dari pengolahan data SPSS akan diketahui *Alpha*, Jika nilai hitung *alpha* lebih besar ($>$) dari 0,6 maka angket dinyatakan reliabel. Hasil uji reliabilitas instrumen dapat dilihat pada Tabel 4.7 seperti berikut:

Tabel 4 7
Hasil Uji Reliabilitas Variabel Penelitian

No	Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	Ket.
1	Sumber Daya Manusia (X1)	0,788	Reliabel
2	Pengendalian Intern (X2)	0,693	Reliabel
3	Pemanfaatan Teknologi Informasi (X3)	0,833	Reliabel
4	Pemahaman Akuntansi (X4)	0,881	Reliabel
5	Kualitas Pelaporan Keuangan (Y)	0,882	Reliable

Sumber: Data Primer diolah, 2017

Berdasarkan Tabel 4.7 hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa nilai *Cronbach's Alpha* dari masing-masing variabel lebih besar dari *Cronbach's Alpha* yaitu 0,6 yang artinya seluruh pernyataan dalam kuesioner penelitian ini reliabel dan dapat digunakan.

4.4.2 Uji Asumsi Klasik

4.4.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data dalam variabel sudah terdistribusi secara normal atau belum. Data yang baik harus memiliki distribusi data yang normal. Uji normalitas data merupakan salah satu bagian dari persyaratan uji asumsi klasik atau analisis data. Jadi sebelum melakukan analisis data yang sesungguhnya perlu dilakukan uji normalitas agar data dapat diketahui pendistribusian datanya sudah normal.

Cara melakukan uji normalitas menggunakan (SPSS (*Statistical Program for Social Science*) versi 20. Penelitian ini

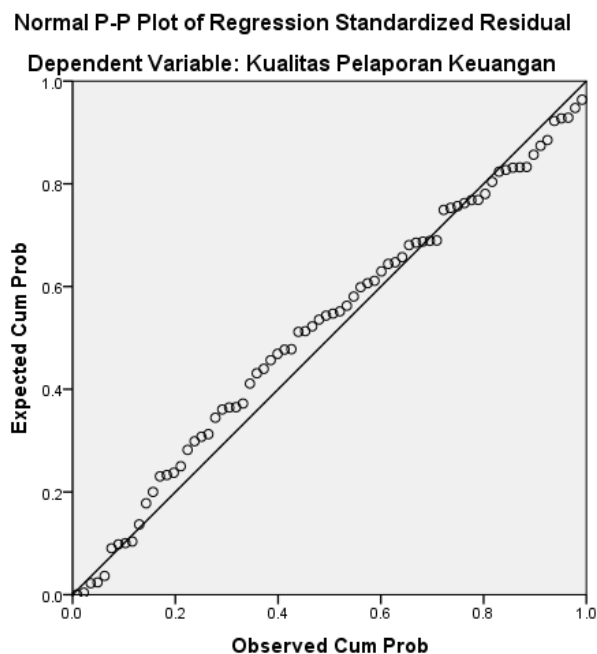
menggunakan non-parametrik dengan menjadi nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)*, jika nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* lebih dari 0,05 maka distribusi datanya normal dan sebaliknya jika nilainya kurang dari 0,05 maka distribusinya tidak normal (I. Ghazali 2012). Hasil uji normalitas dapat dilihat pada Tabel 4.8 seperti berikut:

Tabel 4 8
Hasil Uji Normalitas

	Kualitas Pelaporan Keuangan	Sumber Daya Manusia	Pengendalian Intern	Pemanfaatan Teknologi Informasi	Pemahaman Akuntansi
N	74	74	74	74	74
Kolmogorov-Smirnov Z	1.005	1.082	.626	1.197	1.257
Asymp. Sig. (2-tailed)	.265	.192	.828	.114	.085

Sumber: Data Primer Diolah, 2017

Grafik 1 P-P Plot Regression



Dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini persebaran data dalam variabel termasuk dalam distribusi data normal karena sesuai dengan tabel 4.15 nilai *Asymp.Sig. (2-tailed)* ke-lima variabel lebih besar daripada 0,05 sehingga data ini dapat digunakan untuk analisis. Dan juga dibuktikan dengan grafik P-P Plot terlihat titik – titik menyebar disekitar garis diagonal,serta penyebarannya tidak jauh dari garis diagonal.

4.4.2.2 Uji Multikolonieritas

Multikolonieritas adalah suatu keadaan dimana variabel independen saling berkorelasi satu dengan lainnya. Persamaan regresi berganda yang baik adalah persamaan yang bebas dari adanya multikolonieritas antara variabel independen. Alat ukur yang sering digunakan untuk mengukur ada tidaknya variabel yang berkorelasi, maka digunakan alat uji atau deteksi Variance Inflation Factor (VIF). Dimana nilai VIF tidak lebih dari 10 dan nilai Tolerance tidak kurang dari 0,1. Hasil uji multikolonieritas dapat dilihat pada Tabel 4.9 seperti berikut:

Tabel 4 9
Hasil Uji Multikolonieritas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
<i>(Constant)</i>		
Sumber Daya Manusia	.924	1.083
Pengendalian Intern	.663	1.508
Pemanfaatan Teknologi Informasi	.720	1.388
Pemahaman AKuntansi	.595	1.682

Sumber: Data Primer Diolah, 2017

Dari hasil pengolahan SPSS pada tabel 4.16 dapat disimpulkan bahwa variabel independen dalam penelitian ini tidak terjadi multikolonieritas karena nilai toleransi dari keempat variabel independen diatas lebih besar dari 0,10 dan juga untuk nilai VIF dari keempat variabel independen dibawah dari 10,00.

4.4.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Secara sederhana dasar pengujian adalah sebagai berikut :

- Jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, kesimpulannya adalah tidak terjadi heteroskedastisitas
- Jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 , kesimpulannya adalah terjadi heteroskedastisitas

Model regresi yang baik haruslah tidak terjadi heteroskedastisitas. Untuk mencari nilai signifikan menggunakan aplikasi (SPSS) *Statistical Program for Social Science*) versi 20 menggunakan Uji glejser dalam melakukan pengujian Heteroskedastisitas. Hasil uji heterosketisitas dapat dilihat pada Tabel 4.10 seperti berikut:

Tabel 4 10
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	19.346	5.950		3.251	.002
Sumber Daya Manusia	.013	.109	.014	.121	.904
Pengendalian Intern	-.109	.092	-.160	-1.189	.238
Pemanfaatan Teknologi Informasi	-.052	.085	-.079	-.609	.545
Pemahaman AKuntansi	-.126	.071	-.251	-1.760	.083

sumber: Data Primer Diolah, 2017

Dari tabel 4.10 diatas yang perlu diperhatikan adalah nilai signifikan setiap variabel dimana keempat variabel bernilai signifikan diatas 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas sehingga baik digunakan dalam analisis.

4.4 Analisis Regresi Linier Berganda

Variabel independen dalam penelitian ini mempunyai variabel lebih dari dua, maka regresi dalam penelitian ini disebut regresi berganda. Persamaan Regresi dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen atau bebas yaitu Sumber Daya Manusia (X_1), pengendalian Intern (X_2), Pemanfaatan Teknologi Informasi (X_3), dan Pemahaman Akuntansi (X_4) terhadap variabel dependen yaitu Kualitas Pelaporan Keuangan (Y).

Berikut merupakan hasil olahan analiis regresi linier berganda menggunakan (SPSS) *Statistical Program for Social Science*) versi 20 :

Tabel 4 11
Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	2.383	10.257		.232	.817
Sumber Daya Manusia	-.101	.188	-.045	-.537	.593
Pengendalian Intern Pemanfaatan Teknologi Informasi	.401	.158	.251	2.540	.013
Pemahaman AKuntansi	.253	.147	.163	1.715	.091
	.560	.123	.475	4.551	.000

Sumber: Data Primer Diolah, 2017

Berdasarkan Tabel 4.11, persamaan regresi linear berganda dan variabel-variabel yang diuji disajikan sebagai berikut:

$$2.383Y = -0,101X_1 + 0,401X_2 + 0,253 X_3 + 0,560X_4$$

Berdasarkan persamaan tersebut dapat dijelaskan pengaruh masing-masing variabel pada kualitas pelaporan keuangan pemerintah sebagai berikut:

- 1) Nilai koefisien sumber daya manusia (X_1) sebesar -0,101 menunjukkan sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah.
- 2) Nilai koefisien pengendalian intern (X_2) sebesar 0,401 menunjukkan pengendalian akuntansi mempunyai pengaruh positif terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah. Artinya semakin tinggi tingkat

pengendalian intern dalam setiap pengawasan anggaran maka semakin tinggi pula tingkat kualitas pelaporan keuangan yang dihasilkan.

- 3) Nilai koefisien pemanfaatan teknologi informasi (X_3) sebesar 0,253 menunjukkan pemanfaatan teknologi informasi mempunyai pengaruh positif terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah. Artinya semakin tinggi teknologi yang digunakan maka semakin tinggi pula tingkat kualitas pelaporan keuangan yang dihasilkan.
- 4) Nilai koefisien pemahaman akuntansi (X_4) sebesar 0,560 menunjukkan pemahaman akuntansi mempunyai pengaruh positif terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah. Artinya semakin tinggi pegawai yang memahami akuntansi maka semakin tinggi pula tingkat kualitas pelaporan keuangan yang dihasilkan.

4.5 Pengujian Hipotesis

4.5.1 Uji Hipotesis Parsial (Uji t)

Uji dilakukan untuk menguji hipotesis yaitu pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara individu atau parsial. Dasar dari pengambilan keputusan untuk uji t parsial dalam analisis regresi yaitu ada dua yang pertama adalah berdasarkan nilai t hitung dan t tabel.

- Jika nilai t hitung $>$ t tabel dan nilai signifikan $< \alpha$ 0,05 maka variabel bebas berpengaruh positif signifikan terhadap variabel terikat
- Jika nilai t hitung $<$ dari t tabel dan nilai signifikan $> \alpha$ 0,05 maka variabel bebas tidak berpengaruh terhadap variabel terikat.

Table t yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

$$\begin{aligned} \text{Df} &: n - k \\ &: 74 - 4 \\ &: 70 \end{aligned}$$

Dalam table t nilai dari df 70 pada α 0,05 adalah 1,667.

Berikut merupakan hasil olahan uji hipotesis parsial (uji t) menggunakan (SPSS) *Statistical Program for Social Science*) versi 20 :

Tabel 4 12
Hasil Uji Parsial (t)

Model	T	Sig.
(Constant)	.232	.817
Sumber Daya Manusia	-.537	.593
1 Pengendalian Intern	2.540	.013
Pemanfaatan Teknologi Informasi	1.715	.091
Pemahaman Akuntansi	4.551	.000

Sumber: Data Primer Diolah, 2017

A. Pengaruh Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Uji hipotesis ini dilakukan untuk membuktikan pengaruh langsung sumber daya manusia terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah di OPD yang dilakukan dengan pengujian statistik. Variabel sumber daya manusia (X_1) memiliki nilai t hitung -0,537 dan nilai t table 1,666 dan nilai signifikan 0,593. Dengan demikian H_0 diterima karena tidak adanya pengaruh

sumber daya manusia terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah.

B. Pengaruh Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Uji hipotesis ini dilakukan untuk membuktikan pengaruh langsung pengendalian intern terhadap kualitas pelaporan keuangan OPD yang dilakukan dengan pengujian statistik. Variabel pengendalian intern (X_2) memiliki nilai t hitung 2,540 dan nilai t table 1,666 dan nilai signifikan 0,013. Hal ini membuktikan bahwa dalam penelitian ini pengendalian intern (X_2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah (Y) sehingga hipotesis dapat diterima.

C. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Uji hipotesis ini dilakukan untuk membuktikan pengaruh langsung pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas pelaporan keuangan OPD yang dilakukan dengan pengujian statistik. Variabel pemanfaatan teknologi informasi (X_3) memiliki nilai t hitung 1,715 dan nilai t table 1,666 dan nilai signifikan 0,091. Hal ini membuktikan bahwa dalam penelitian ini pemanfaatan teknologi informasi (X_3) berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah (Y) sehingga H_0 ditolak.

D. Pengaruh Pemanfaatan Akuntansi Terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Uji hipotesis ini dilakukan untuk membuktikan pengaruh langsung pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas pelaporan keuangan OPD yang dilakukan dengan pengujian statistik. Variabel pemahaman akuntansi (X_4) memiliki nilai t hitung 4,551 dan nilai t table 1,666 dan nilai signifikan 0,000. Hal ini membuktikan bahwa dalam penelitian ini pemanfaatan teknologi informasi (X_3) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah (Y) sehingga hipotesis dapat diterima.

4.5.2 Uji Hipotesis Simultan (Uji F)

Pengujian yang keempat dilakukan secara simultan artinya mencari pengaruh dari keempat variabel secara bersama-sama terhadap variabel terikat dengan dua cara yaitu dengan membanding nilai F hitung dengan nilai F tabel, dan juga dengan cara lain yaitu dengan membandingkan nilai signifikansi yang muncul dalam tabel ANOVA di output analisis SPSS dengan nilai probabilitas yaitu 0,05.

Dasar pengujian dalam uji f yaitu jika nilai F hitung yang ada pada output SPSS lebih besar ($>$) dari F tabel maka dinyatakan bahwa variabel bebas secara simultan berpengaruh terhadap variabel terikat, begitu juga sebaliknya jika nilai F hitung lebih kecil ($<$) maka dinyatakan bahwa variabel bebas secara simultan tidak berpengaruh pada variabel terikat.

Berikut hasil uji hipotesis simultan (uji F) melalui (SPSS) *Statistical Program for Social Science*) versi 20 :

Tabel 4 13
Hasil Uji Hipotesis Simultan

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2411.523	4	602.881	21.377	.000 ^b
	Residual	1945.936	69	28.202		
	Total	4357.459	73			

Sumber: Data Primer Diolah, 2017

Dari tabel 4.13 diatas didapatkan nilai F hitung adalah 21,377 akan bandingkan dengan nilai F tabel. Cara mengetahui F tabel adalah membandingkan (df1, df2) dengan Rumus (df1 :k – 1) dimana k adalah jumlah variabel independen dan variabel dependen. Dalam penelitian ini k berjumlah 5 maka df1 bernilai 4. Selanjutnya untuk membaca table F dibutuhkan nilai dari (df2 : n – k) dimana n adalah jumlah sampel, jadi df2 bernilai 70. Sehingga F table bernilai 2,50. Dengan begitu nilai F hitung lebih besar (21,377) dari F table (2,50). Selain itu signifikansi ANOVA senilai 0,000 yang memberikan nilai lebih kecil dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan melakukan uji F diketahui sumber daya manusia (X₁) , pengendalian intern (X₂), pemanfaatan teknologi informasi (X₃) dan pemahaman akuntansi (X₄) secara bersama-sama atau simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah (Y).

4.5.3 Uji Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa besar kemampuan model dalam menerangkan variabel terikat. Koefisien determinasi dapat menjelaskan variabel dependen apabila (R^2) > 50% (I. Ghozali 2012). Penjelasan mengenai koefisien diterminasi lebih mudah dengan menggunakan tabel *Model Summary* yang ada pada hasil output SPSS setelah dilakukan analisis regresi linier. Berikut hasil tabel 4.14 pada R^2 dengan SPSS 20:

Tabel 4 144
Hasil Uji Koefisien Dterminasi (R^2)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.744 ^a	.553	.528	5.311

Sumber: Data Primer Diolah, 2017

Dalam penelitian ini koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,553 (55,3%). Sehingga dapat dikatakan bahwa kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah (Y) mampu dijelaskan oleh sumber daya manusia (X_1), pengendalian intern (X_2), pemanfaatan teknologi informasi (X_3) dan pemahaman akuntansi (X^4) sebesar 55,3% sedangkan selebihnya sebesar 44,7% dijelaskan oleh sebab-sebab yang lain. Demikian juga jika dilihat dari nilai adjusted R^2 yang bernilai 0,528 (52,8%) yang artinya nilai R^2 yang disesuaikan terhadap variabel bebas yang ada. Berarti 52,8% variabel bebas dapat menjelaskan variabel terikatnya sedangkan sisanya 47,2% dijelaskan oleh sebab-sebab yang lain.

4.6 Pembahasan

1. Pengaruh sumber daya manusia terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah

Hasil pengujian hipotesis ditemukan adanya bukti yang menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh antara sumber daya manusia terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian ini mendukung secara empiric studi yang dilakukan oleh Desi dan Ertambang (2008), Dhany (2010), Faristina (2011) dan Dita (2011) yang menghasilkan kapasitas SDM tidak berpengaruh signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan.

Ketidaksignifikanan ini mungkin disebabkan kondisi kapasitas sumber daya manusia di subbagian akuntansi atau tata usaha keuangan yang belum mendukung baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Dari sisi kualifikasi, sebagian besar pegawai subbagian akuntansi/tata usaha keuangan tidak memiliki latar belakang pendidikan akuntansi dan hal ini terlihat dari data demografi responden. Uraian tugas dan fungsi subbagian akuntansi atau tata usaha keuangan yang ada juga masih terlalu umum (belum terspesifikasi dengan jelas). Dari sisi kuantitas, masih sangat sedikit jumlah akuntan atau pegawai yang berpendidikan tinggi akuntansi, sementara peraturan perundang – undangan telah mewajibkan setiap satuan kerja untuk menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan, maka pegawai yang ada diberdayakan. Kelemahan yang ada

diimbangi dengan mengikutsertakan pegawai dalam pelatihan – pelatihan yang berhubungan dengan akuntansi dan pengelolaan keuangan daerah seperti pelatihan perpajakan, pelatihan bendahara, pelatihan SIMDA keuangan, dan pelatihan penatausahaan pengelolaan keuangan daerah. Akan tetapi, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan Celviana dan Rahmawati (2010) yang menyimpulkan bahwa kapasitas SDM berpengaruh signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan (Zuliarti 2012). Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian (Sari 2012) tidak berpengaruhnya sumber daya manusia dimungkinkan oleh adanya SDM yang kurang berkualitas, sehingga laporan keuangan yang diharapkan diandalkan yaitu bebas dari pengertian menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi tidak dapat tercapai.

2. Pengaruh pengendalian intern terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah

Ditemukan adanya bukti yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara sistem pengendalian intern pemerintah dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dan hubungannya positif. Pengaruh antara sistem pengendalian intern pemerintah dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah semakin baik sistem pengendalian intern pemerintah maka kualitas laporan keuangan yang dihasilkan pemerintah akan semakin baik pula.

Pengendalian internal menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan proses yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai mengenai pencapaian tujuan pemerintah daerah yang tercermin dari keandalan laporan keuangan, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan serta dipatuhinya peraturan perundang-undangan. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Indriasari (2008) dalam Rinaldi (2008), Sistem Pengendalian Internal berpengaruh signifikan positif terhadap nilai informasi pelaporan keuangan daerah.

3. Pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah

Dari hasil pengujian hipotesis, ditemukan adanya bukti yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang tidak signifikan antara pemanfaatan teknologi informasi dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dan hubungannya positif. Hasil penelitian ini sejalan dengan (Riandani 2009), menjelaskan bahwa pemanfaatan teknologi informasi keuangan daerah masih mengalami hambatan karena peralatan dan software pendukung yang masih sering mengalami kendala sehingga membutuhkan waktu perbaikan yang cukup lama dan berdampak pada jadwal waktu pelaporan yang mengalami penyesuaian atau mengalami kemunduran dan ini berimplikasi pada ketidaktepatan pelaporan keuangan pemerintah daerah sebagai karakteristik kualitatif laporan keuangan itu sendiri.

Dari penelitian yang dilakukan oleh (Oktarani 2010) menunjukkan pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap pelaporan keuangan instansi, dikarenakan secara umum pemanfaatan TI oleh instansi pemerintah relative kurang optimal dan belum menunjukkan arah pembentukan *E-Government* yang baik. Beberapa kelemahan yang menonjol antara lain adalah pelayanan yang diberikan melalui situs pemerintahan tersebut, belum ditunjang oleh sistem manajemen dan proses kerja yang efektif dan belum mepannya strategi serta tidak memadainya anggaran yang dialokasikan untuk pengembangan TI pada masing- masing instansi.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hara (2010) dan Novita (2008) yang menyimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh antara pemanfaatan teknologi informasi terhadap AKIP Kota Pekanbaru.

4. Pengaruh pemahaman akuntansi terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah

Dari hasil pengujian hipotesis, ditemukan adanya bukti yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara pemahaman akuntansi dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dan hubungannya positif. Pengaruh antara pemahaman akuntansi dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah semakin besar pemahaman akuntansi maka kualitas laporan keuangan yang dihasilkan pemerintah akan semakin baik pula.

Dilihat dari tujuan pelaporan keuangan adalah membuat sistem pemrosesan dan komunikasi yang meringkaskan informasi perusahaan yang sangat banyak ke dalam bentuk yang bisa dipahami. Oleh karena itu dibutuhkan pemahaman akuntansi yang baik dalam melakukan pelaporan keuangan pemerintah daerah, sehingga laporan keuangan tersebut memenuhi karakteristik kualitatif. Pemahaman akuntansi bagi pihak – pihak yang berkaitan dengan pelaporan keuangan pemerintah daerah ternyata akan meningkatkan kualitas pelaporan keuangan yang dihasilkan.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Setiawati 2014) bahwa pemahaman akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah. Ternyata pemahaman akuntansi menentukan hasil dari pelaporan keuangan pemerintah daerah.

5. Pengaruh sumber daya manusia, pengendalian intern, pemanfaatan teknologi informasi dan pemahaman akuntansi terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah

Hasil yang diperoleh dalam pengujian secara simultan menghasilkan hubungan yang positif dan signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah. Didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh, Rinaldi (2008) ,(Setiawati 2014) , (Prasetyo 2011) dan (Zuliarti 2012) bahwa secara simultan atau bersama-sama sumber daya manusia, pengendalian intern, pemanfaatan teknologi informasi, dan pemahaman akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja.

Jika dari sumber daya manusia sudah memadai, sudah maksimal penerapan pengendalian intern, sudah memaksimalkan pemanfaatan teknologi yang ada, dan pegawai sudah banyak yang memahami akuntansi maka hasil dari laporan keuangan pemerintah akan semakin baik dan tingkat akuntabilitasnya akan semakin tinggi.

